
**TANTANGAN PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN
PKN DI SD NEGERI 3 PRINGSEWU BARAT**

Serly Firlana¹, Ully Rahayu², Tri Wulandari³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung

Email: firlana.2023406405147@student.umpri.ac.id¹,
ullyrhy.2023406405107@student.umpri.ac.id²,
wulandari.2023406405116@student.umpri.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dalam penerapan kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKN) di SD Negeri 3 Pringsewu Barat. Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan pada tahun 2022 menekankan pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan berbasis proyek, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai kendala baik dari segi pemahaman guru, keterbatasan sarana, maupun pelaksanaan asesmen yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung di kelas, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam memahami esensi kurikulum Merdeka dan cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional. Selain itu, asesmen masih terfokus pada aspek kognitif, sementara aspek sikap dan keterampilan belum tergarap maksima. Faktor pendukung seperti penelitian, pendampingan, dan fasilitas pembelajaran juga belum memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman guru, memperkuat sarana pendukung, serta menyusun strategi implementasi kurikulum yang relevan dan kontekstual.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Pendidikan Kewarganegaraan, Pembelajaran Berdiferensiasi, Asesmen Autentik, Sekolah Dasar.

Abstract: This study aims to identify and analyze the challenges in implementing the Merdeka Curriculum in Civics Education (PKN) at SD Negeri 3 Pringsewu Barat. The Merdeka Curriculum, introduced in 2022, emphasizes differentiated learning, project-based approaches, and the strengthening of the Pancasila Student Profile. However, its implementation faces various obstacles, particularly in teachers' understanding, limited school infrastructure, and the suboptimal practice of authentic assessment. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, classroom observations, and document analysis. The findings reveal that many teachers still struggle to grasp the core philosophy of the curriculum and tend to rely on conventional teaching methods. In addition, assessment practices are still dominated by cognitive aspects, while affective and psychomotor domains are often overlooked. Supporting factors such as training, mentoring, and learning facilities are also insufficient. Therefore,

systematic and continuous efforts are needed from various stakeholders to enhance teacher capacity, improve learning infrastructure, and develop relevant and contextual curriculum implementation strategies.

Keywords: Merdeka Curriculum, Civics Education, Differentiated Learning, Authentic Assessment, Primary School.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan kurikulum sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan global. Salah satu transformasi besar dalam dunia pendidikan adalah lahirnya Kurikulum Merdeka pada tahun 2022, yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum ini hadir dengan semangat untuk memberikan kebebasan belajar, menekankan pembelajaran yang berdiferensiasi, pendekatan berbasis proyek, dan penguatan nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 2024).

Dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka memberikan tantangan tersendiri bagi setiap mata pelajaran, termasuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter peserta didik sejak dini, terutama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, hak asasi manusia, dan semangat kebangsaan. Melalui Kurikulum Merdeka, pembelajaran PKn diharapkan tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis, berdiskusi, dan terlibat langsung dalam pengalaman belajar yang bermakna (Junita et al., 2024).

Namun, penerapan Kurikulum Merdeka di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Banyak guru yang masih mengalami kebingungan dalam memahami filosofi kurikulum ini. Mereka kerap terjebak dalam rutinitas pembelajaran konvensional seperti ceramah, dan belum mampu menerapkan pembelajaran yang bersifat partisipatif dan kontekstual. Pembelajaran berbasis proyek yang seharusnya dikaitkan dengan isu-isu nyata di sekitar siswa justru sering kali bersifat simbolis dan tidak menyentuh kehidupan sehari-hari.

Selain keterbatasan pemahaman guru, tantangan lain yang muncul adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Banyak sekolah dasar, terutama yang berada di daerah pinggiran, belum memiliki akses memadai terhadap teknologi pembelajaran dan media ajar yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi (Mandasari et al., 2023).

Keterbatasan ini menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka antara sekolah satu dengan lainnya.

Dari sisi asesmen, Kurikulum Merdeka sebenarnya menekankan pentingnya penilaian autentik dan formatif untuk melihat perkembangan siswa secara holistik. Namun dalam praktiknya, asesmen masih cenderung berfokus pada aspek kognitif semata, sementara aspek sikap dan keterampilan belum tergarap secara optimal. Hal ini diperparah oleh beban administrasi yang tinggi dan kurangnya pelatihan bagi guru dalam menyusun dan menerapkan asesmen yang sesuai (Karlina et al., 2024).

Fakta lainnya menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum mengikuti pelatihan atau pendampingan khusus terkait Kurikulum Merdeka. Laporan dari Kemendikbudristek (2024) menyebutkan bahwa baru sekitar 40% guru SD yang pernah mendapatkan pelatihan secara langsung. Padahal, keberhasilan implementasi kurikulum ini sangat bergantung pada kesiapan dan pemahaman guru sebagai ujung tombak pelaksana di kelas.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai tantangan penerapan Kurikulum Merdeka, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi guru, serta merumuskan strategi praktis yang dapat membantu memperkuat implementasi kurikulum secara lebih efektif dan kontekstual. Dengan berlandaskan pada referensi akademik dan kebijakan pendidikan terbaru, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn yang relevan dengan kebutuhan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SD Negeri 3 Pringsewu Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, fenomena, dan konteks sosial dari sudut pandang partisipan (Moleong, 2019). Fokus studi diarahkan pada satu satuan kasus, yakni SD Negeri 3 Pringsewu Barat, sehingga memungkinkan eksplorasi yang intensif terhadap permasalahan yang ada (Yusuf, 2017). Subjek penelitian mencakup guru PKn, kepala sekolah, serta siswa sebagai pelengkap observasi, yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka dalam

mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Sugiyono, 2017).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman dan pengalaman guru serta kepala sekolah terhadap implementasi kurikulum. Observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran PKn untuk melihat penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen autentik secara langsung. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup analisis terhadap modul ajar, RPP, jurnal refleksi guru, dan laporan hasil asesmen (Satori & Komariah, 2020). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif dan tabel, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan makna yang muncul dari data. Teknik triangulasi sumber dan member check digunakan untuk menjaga keabsahan data (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di SD Negeri 3 Pringsewu Barat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dari berbagai data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi kelas, dan analisis dokumen pembelajaran, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. **Pemahaman Guru Terhadap Kurikulum Merdeka**

Guru-guru PKn di sekolah ini menunjukkan semangat dan antusiasme dalam menjalankan Kurikulum Merdeka. Namun, semangat ini belum dibarengi dengan pemahaman yang utuh mengenai filosofi dan prinsip utama kurikulum tersebut. Beberapa guru mengakui bahwa mereka masih belum yakin bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau merancang proyek yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa. Banyak yang masih berfokus pada aspek administratif atau formalitas kurikulum, seperti mengganti format RPP atau membuat proyek sederhana.

2. **Proyek Pembelajaran Belum Terkait Kehidupan Nyata**

Meskipun Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan lingkungan siswa, kenyataannya proyek yang dibuat di kelas sering kali bersifat umum dan kurang menyentuh realitas kehidupan siswa. Proyek-proyek ini masih lebih banyak digunakan sebagai pelengkap kegiatan, bukan sebagai bagian inti

dari proses belajar yang bermakna dan kontekstual.

3. Pembelajaran Masih Banyak Didominasi Ceramah

Selama observasi kelas berlangsung, ditemukan bahwa pendekatan pembelajaran masih sangat bergantung pada metode ceramah. Kegiatan diskusi, kolaborasi kelompok, atau aktivitas yang mendorong partisipasi siswa masih terbatas. Siswa lebih sering menjadi pendengar daripada pelaku aktif dalam proses pembelajaran.

4. Fasilitas dan Sarana Masih Terbatas

Salah satu kendala yang cukup mencolok adalah kurangnya sarana pendukung pembelajaran, terutama media teknologi seperti proyektor, internet, atau perangkat digital. Hal ini membuat guru kesulitan untuk menjalankan pembelajaran interaktif atau menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi dan menarik.

5. Asesmen Autentik yang Belum Optimal

Dalam hal penilaian, sebagian besar guru masih mengandalkan tes tertulis dan ulangan harian untuk mengukur pemahaman siswa. Belum banyak ditemukan asesmen autentik yang mengukur aspek sikap atau keterampilan siswa secara nyata. Padahal, Kurikulum Merdeka mendorong penilaian yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada proses.

6. Kurangnya Pelatihan dan Pendampingan

Guru juga menyampaikan bahwa mereka jarang mendapat pelatihan khusus mengenai Kurikulum Merdeka, terutama yang fokus pada mata pelajaran PKn. Bahkan beberapa di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan langsung sejak kurikulum ini diterapkan. Hal ini membuat mereka sering merasa ragu dan tidak percaya diri dalam merancang pembelajaran.

7. Potensi Siswa yang Belum Tersalurkan

Observasi kelas menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme tinggi ketika diberikan kesempatan berdiskusi tentang isu sosial seperti keberagaman dan toleransi. Namun, karena pendekatan guru yang masih bersifat satu arah, potensi ini tidak termanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi peran guru dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran aktif.

Temuan-temuan di atas menggambarkan bagaimana penerapan Kurikulum Merdeka di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur sekolah. Fakta bahwa guru antusias namun masih mengalami

kebingungan dalam memahami isi dan arah Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak cukup hanya dengan mengganti dokumen atau istilah baru. Perubahan sejati seharusnya terjadi pada cara berpikir dan pendekatan mengajar guru. Seperti dijelaskan oleh (Junita et al., 2024), banyak guru masih terpaku pada rutinitas lama karena belum benar-benar memahami bahwa Kurikulum Merdeka menuntut guru menjadi fasilitator aktif, bukan hanya sebagai penyampai informasi.

Masalah lain yang cukup menonjol adalah pelaksanaan proyek yang belum kontekstual. Padahal, proyek yang baik seharusnya bisa menggugah empati siswa, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, dan membangun keterampilan kolaboratif. Namun seperti dikatakan (Mandasari et al., 2023), proyek sering kali hanya menjadi pelengkap tugas karena guru tidak memiliki cukup panduan atau contoh proyek yang relevan dan terstruktur.

Dalam aspek pembelajaran di kelas, dominasi metode ceramah menunjukkan bahwa pembelajaran belum bertransformasi menjadi aktif dan partisipatif seperti yang ditekankan Kurikulum Merdeka. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan pengetahuan guru hingga rendahnya fasilitas pendukung. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Karlina et al., 2024) yang menyebutkan bahwa keterbatasan akses terhadap pelatihan dan teknologi merupakan penghambat utama inovasi pembelajaran.

Demikian pula dalam asesmen, masih kuatnya fokus pada aspek kognitif memperlihatkan bahwa paradigma penilaian belum bergeser secara menyeluruh. Penilaian yang seharusnya mencerminkan keseluruhan perkembangan siswa (pengetahuan, sikap, keterampilan) masih terbatas pada hasil ujian tertulis.

Kendala dalam pelatihan guru juga menjadi perhatian penting. Guru sebagai pelaksana utama di kelas seharusnya mendapat dukungan yang memadai untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka. Tanpa pelatihan yang terarah dan pendampingan yang berkelanjutan, guru akan kesulitan menjalankan peran barunya secara optimal.

Namun di balik berbagai tantangan itu, terdapat satu potensi besar yang layak dikembangkan, yaitu semangat dan antusiasme siswa. Temuan bahwa siswa tertarik membahas isu-isu sosial dan nilai-nilai kebangsaan merupakan peluang emas untuk menjadikan pembelajaran PKn sebagai sarana pembentukan karakter yang efektif. Dengan strategi yang tepat, pembelajaran PKn bisa menjadi ruang dialog yang menyenangkan dan bermakna bagi

siswa.

Kesimpulannya, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak cukup hanya bergantung pada ketersediaan dokumen kurikulum atau kebijakan dari pusat. Diperlukan pemahaman yang utuh, pelatihan yang aplikatif, serta fasilitas yang memadai agar guru mampu menerjemahkan semangat kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang kontekstual dan berpihak pada siswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SD Negeri 3 Pringsewu Barat menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Guru masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerjemahkan filosofi Kurikulum Merdeka ke dalam praktik pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran cenderung masih bersifat konvensional, kurang melibatkan siswa secara aktif, serta belum mengakomodasi perbedaan karakteristik dan kebutuhan belajar individu. Selain itu, proses asesmen belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan autentik yang menilai aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Kurangnya pelatihan dan pendampingan, serta keterbatasan sarana prasarana, turut memperkuat hambatan dalam proses implementasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah dan dinas pendidikan perlu menyediakan pelatihan yang berkelanjutan dan aplikatif bagi guru, khususnya dalam mata pelajaran PKn. Sekolah juga perlu memperkuat sarana pendukung, seperti media ajar kontekstual dan teknologi pembelajaran. Kepala sekolah diharapkan berperan aktif dalam mendampingi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, guru perlu mengembangkan budaya refleksi dan evaluasi mandiri agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan dan adaptif terhadap dinamika kurikulum.

REFERENCES

- Junita, E., Hasanah, I., & Syahrial, S. (2024). Analisa Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SDN 106162 Medan Estate. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 4(1), 13–21. <https://doi.org/10.51878/elementary.v4i1.2804>
- Karlina, S., Khoirany, N. S., Nurantika, R., Rahmani, S. N., Nurjamilah, S., & Rahman, A. S. (2024). Tantangan Guru Dan Siswa Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Di

- Sekolah. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(3), 172–179.
<https://doi.org/10.58812/spp.v2i03.320>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. (2024). *Tantangan Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka*. KSPSTENDIK Kemdikbud.
<https://kspstendik.dikdasmen.go.id/artikel/detail/tantangan-dalam-penerapan-kurikulum-merdeka>
- Mandasari, N. K., Harahap, N. M., Humayroh, A. P., & Salsabila, S. (2023). Analisis Implementasi dan Tantangan Kurikulum Merdeka bagi Guru di SDN 101766 Bandar Setia. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
<https://doi.org/10.61132/sadewa.v3i2.1687>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakaya.
- Satori, D., & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Yusuf, A. M. (2017). *METODE PENELITIAN (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*. Kencana.